

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan kluster ketenagakerjaan, baik bagi pihak pemberi kerja maupun pihak pekerja menunjukkan bahwa terdapat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang diubah, dihapus atau ditetapkan peraturan yang baru oleh Undang-undang Cipta Kerja. Namun dalam klaster ketenagakerjaan tersebut ditemukan berbagai substansi yang dapat menyebabkan para pembaca baik dari pihak pekerja, pemberi kerja, ataupun masyarakat mengalami ketidakjelasan. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut ditemukan beberapa kalimat ataupun kata yang membuat perubahan pengaturan pasal-pasal yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu Undang-Undang Cipta Kerja perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana yang diamanatkan oleh undang-undang itu sendiri guna mendukung aspek ekonomi, sosial, politik Indonesia.
2. Permasalahan yang dapat muncul dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja apabila ditinjau dari prespektif hukum ketenagakerjaan tentunya juga beragam sesuai dengan sektor-sektor ketenagakerjaan yang diatur yakni sektor Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Pengupahan, dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Masalah-masalah tersebut ialah penyederhanaan peraturan yang dapat mengakibatkan ~~bisa~~ terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak pemberi kerja. Peluang atau kesempatan pekerja/buruh yang dikhawatirkan makin sulit untuk dicapai, selain itu kompensasi yang juga dikhawatirkan pekerja/buruh tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka seperti yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Serta kekhawatiran pemberi kerja kepada

ketertarikan investor yang rendah karena dengan adanya perubahan pengaturan uang pesangon yang mengakibatkan biaya perusahaan makin tinggi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut maka dapat diberikan saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada para Pekerja agar mempelajari dan memahami Undang-Undang Cipta Kerja supaya dalam penerapannya dapat sesuai dengan aturan yang berlaku dan jika terdapat tidak dipenuhinya hak-hak pekerja, dapat dilaporkan segera kepada aparat yang berwenang agar kepastian hukum bagi para pekerja dapat terus dijaga. Pekerja juga diharapkan bisa melakukan *judicial review* dengan bantuan lembaga hukum agar berbagai pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta Peraturan Pelaksananya yang mengurangi hak pekerja dapat dibatalkan sehingga tidak terjadi penurunan derajat kesejahteraan pekerja.
2. Disarankan bagi para Pemberi Kerja untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun dalam Peraturan Pelaksananya dengan baik, jujur, dan solider agar kepastian hukum bagi pekerja ataupun pemberi kerja dapat bersama terjamin dan terlaksanakan, sehingga terpenuhi hubungan industrial yang harmonis.
3. Disarankan bagi Lembaga Legislatif untuk membentuk hukum yang akan mendukung terlaksananya dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan memperhatikan keadaan dan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya karena Undang-Undang Cipta Kerja merupakan payung hukum yang akan menjadi dasar untuk membuat peraturan lain pada masa yang akan datang.
4. Disarankan bagi Pemerintah pusat untuk membuat ketentuan dari peraturan pelaksana yang disesuaikan dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan pelaksanaan tersebut jangan sampai menimbulkan permasalahan baru bagi para pihak dalam hubungan kerja.
5. Untuk Pemerintah Daerah disarankan untuk membuat ketentuan dari peraturan daerah yang menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Redi, Ibnu Sina Chandranegara, 2020, Omnibus Law: Diskursus Pengabdosiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional, Depok: Rajawali Pers

Disnakertrans, 2020, Hak-Hak Perusahaan Dan Karyawan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Jakarta

D. Sasongko, 2017, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan

Ervina, 2019, Pengusaha dan Pekerja Wajib Memahami Undang-Undang Ketenagakerjaan, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2020, Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia, Jakarta: Konpress
Kamus Besar Bahasa Indonesia

Marulak Pardede, 2021, Omnibus Law: Dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Papas Sinar Sinanti

Muhamad Sadi, Sobandi, 2019, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Palembang

Rachmat Trijono, 2020, Omnibus Law: Cipta Lapangan Kerja, Jakarta: Papas Sinar Sinanti

Rio Christiawan, 2021, Omnibus Law: Teori Dan Penerapannya, Jakarta

Suwandi Arham & Ahmad Saleh, 2019, Omnibus Law Dalam Prespektif Hukum Indonesia

JURNAL

Adelia Rachma Indriaswari Susanto, Aqsal Adzka, Cora Kristin Mulyani, Muhammad Hamzah Al Faruq, Natalische Ramanda Ricko Aldebarant, *Sebuah Kajian Mengupas Omnibus Law Bikin Gak Law* Jilid 1: Pembahasan Formil, Kajian 5 Jilid 1

Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha Triputra, Yoyok Junaidi, *Politik Hukum di Indonesia*, 2020

Ady Thea, *Begini Penerapan 3 Jenis PKWT dalam UU Cipta Kerja*, Maret 2021

Ady Thea, *Ini Bedanya Outsourcing di UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja*, Juli 2021

Ari Mochamad, *Diskusi Publik Online: Serial Diskusi Omnibus Law Cipta Kerja*, Oktober 2020

Asep Warlan Yusuf, *Diskusi Publik Online: Serial Diskusi Omnibus Law Cipta Kerja*, Oktober 2020

Catharina Dewi Wulansari, *Undang-Undang Kerja Klaster Ketenagakerjaan Dan Peraturan Pelaksanaannya, Disampaikan pada kegiatan FGD Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Dan Peraturan Pelaksanaannya, Kerjasama Kementerian Tenaga Kerja dan Politeknik Ketenagakerjaan, Hotel Sheraton Bandung, Desember 2020*

Hernindyo Bagaskhara, *UU Cipta Kerja Sah! TKA Mendapatkan Kemudahan Masuk Indonesia*, November 2020

I Putu Eka Cakra, Aditya Yuli Sulistyawan, *Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Volume 02 Nomor 02, November 2020

Novia Widya Utami, *UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasannya*, Januari 2020

Ruben L. Situmorang, *Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Volume 1, Nomor 1, Januari 2013

Tsarina Maharani, *Ini Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja*, Oktober 2020

Yagus Suyadi, *Diskusi Publik Online: Serial Diskusi Omnibus Law Cipta Kerja*, Oktober 2020

Yudho Winarto, *Pengusaha menantikan implementasi aturan turunan UU Cipta Kerja*,
Desember 2020

PERATURAN

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

INTERNET

https://en.wikipedia.org/wiki/Omnibus_bill

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5206988/alasan-pengusaha-ngotot-ri-perlu-uu-cipta-kerja>

<http://indonesiabaik.id/infografis/11-klaster-peraturan-pelaksanaan-uu-cipta-kerja>

<http://kagama.co/omnibus-law-tanpa-sistem-kodifikasi-hukum-yang-baik-hanya-akan-jadi-masalah-baru/2>

<https://kumparan.com/justitiaclubinfo/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-undang-undang-cipta-kerja-1wzIT11KcaN/full>

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt6036081634e54/yuk-unduh-daftar-49-peraturan-pelaksana-uu-cipta-kerja-di-sini>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/01/11505841/5-poin-uu-cipta-kerja-yang-dinilai-rugikan-buruh?page=2>

<https://nasional.kontan.co.id/news/pengusaha-sebut-uu-cipta-kerja-justru-beri-kepastian-bagi-dunia-usaha-dan-pekerja>

<https://news.detik.com/berita/d-5206291/gelombang-demo-ricuh-omnibus-law-di-penjuru-nusantara/1>

<https://news.detik.com/berita/d-5206258/ini-isi-omnibus-law-yang-ditolak-buruh-dan-picu-demo-rusuh>

<https://psisaskenergyprojectindonesia.files.wordpress.com/2021/03/pp-turunan-uu-cp.pdf>

<https://tirto.id/demo-hari-ini-tolak-omnibus-law-kronologi-daftar-lokasi-penyebab-f5Kj>

<https://www.amnesty.id/omnibus-bill-on-job-creation-poses-serious-threat-to-human-rights/>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54611952>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200203155118-92-471227/respons-pengusaha-terhadap-penerbitan-uu-omnibus-law-cilaka>

<https://www.depokpos.com/2020/10/soal-pesangon-phk-uu-cipta-kerja-apa-masalahnya/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-cacat-formil--mk-putusan-status-keberlakuan-uu-cipta-kerja-lt619f444f8e5f4?page=1>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fc49bb4843bf/uu-cipta-kerja-legalkan-penyederhanaan-rekrutmen-tka?page=3>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6095378ff0690/ada-9-perubahan-uu-ketenagakerjaan-lewat-uu-cipta-kerja?page=1>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2003-ketenagakerjaan>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/104500965/apa-itu-omnibus-law-cipta-kerja-isi-dan-dampaknya-bagi-buruh?page=all>

<https://www.kompasiana.com/aprilgsrynx/61abaabd75ead629d4312382/hitam-putih-uu-ciptaker-pasca-putusan-mk-nomor-91-puu-xviii-2020#:~:text=Putusan%20MK%20No.91%2FPUU-XVIII%2F2020%20merupakan%20putusan%20yang%20paling%20fenomenal,sebagian%20permohonan%20dan%20menyatakan%20inkonstitusional%20namun%20tidak%20mencabutnya>
a

https://www.kompasiana.com/renomaraturmunthe/61b8f87e3a18150a382caf72/mkri-no-91-puu-xviii-2020-dalam-perspektif-stufen-tehory?page=1&page_images=1

<https://kumparan.com/justitiacclubinfo/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-undang-undang-cipta-kerja-1wzIT11KcaN/full>

<https://www.law-justice.co/artikel/120592/5-ambiguitas-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja-inkonstitusional/>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4381312/serikat-buruh-tujuan-kami-demo-bukan-untuk-jatuhkan-presiden>

<https://psisaskenergyprojectindonesia.files.wordpress.com/2021/03/pp-turunan-uu-cp.pdf>